



Redaksi menerima sumbangan naskah dari para pembaca.
Naskah dikirim ke e-mail naskahkr@gmail.com. Terima kasih

Kesalihan Ritual Puasa Ramadan

Prof Dr Sutrisna Wibawa MPd

ALHAMDULILLAH Ramadan tahun ini merupakan kali pertama, setelah kita mulai terbebas dari wabah Covid-19 atau setidaknya transisi dari pandemi menuju endemi. Semoga wabah Covid-19 benar-benar hilang dari permukaan bumi. Kini kita melaksanakan ibadah puasa dengan tenang, melaksanakan salat wajib dan salat sunah secara berjamaah di masjid dengan khusus, memperbanyak doa dan zikir di masjid, serta melaksanakan berbagai ibadah sunah lain yang dilaksanakan di masjid dengan tenang tanpa ditakuti penularan Covid-19, dengan tetap waspada menjaga diri. Keadaan ini akan meningkatkan kesalihan ritual kita kepada Allah SWT, dalam menjalankan puasa Ramadan beserta ibadah sunah di bulan Ramadan. Secara umum kesalihan ritual dimaknai sebagai ibadah yang dilakukan dalam konteks memenuhi *hablum minallah* (kewajiban kepada Allah SWT dengan mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya) seperti salat, puasa, haji dan ritual lainnya.

Kewajiban puasa Ramadan diperintahkan Allah SWT kepada umat-Nya sebagaimana termaktub dalam Quran Surat Al-Baqarah, ayat 183, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa". Selanjutnya Rasulullah SAW menyatakan, "Ramadhan adalah bulan yang diwajibkan oleh Allah bagi kalian berpuasa, dan aku telah mensunahkan untuk kalian agar salat (tarawih). Maka barang siapa yang berpuasa dan mendirikan (salat tarawih) dengan penuh keimanan dan pengharapan akan dihapuskan dosa-dosanya sebagaimana keadaan bayi yang baru lahir dari perut ibunya" (HR. Ibnu Majah dan Al-Baihaqi).

Ayat dan hadis di atas merupakan perintah Allah SWT kepada umat Islam agar menjalankan puasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan merupakan rukun Islam dan wajib dikerjakan oleh setiap muslim. Barang siapa yang meninggalkannya ia tidak memenuhi syarat rukun Islam. Berpuasa pada Ramadan harus sebulan penuh dan tidak boleh ada

satu hari pun yang tertinggal. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan sabda Nabi SAW, bahwa "barang siapa yang meninggalkan dengan sengaja sehari saja puasa di bulan Ramadan tanpa ada *rukhsakh* (atau *udzur* yang menghalanginya), maka ia tidak akan dapat menggangganya dengan puasa yang lain, meskipun puasa sepanjang masa". Ibadah puasa amal mulia yang pahalanya akan dibalas langsung oleh Allah SWT. Jika amal-amal lain telah disebutkan pahalanya oleh Allah SWT, ternyata pahala puasa akan langsung diberikan-Nya tanpa diberitahukan terlebih dahulu berapa batasan pahalanya. Ibarat seseorang yang bekerja dan telah disebutkan gajinya sekian, maka kita bisa memperkirakan berapa hasil yang diperoleh. Tetapi saat *owner* perusahaan atau bos kita mengatakan "bekerjalah dan saya langsung yang akan memberikan gaji-mu" bisa jadi hasil yang kita dapatkan di luar dugaan kita, tergantung bagaimana kualitas kerja kita. Allah berfirman: "Setiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa, maka itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya..."

Ramadan dapat dianalogikan sebagai tamu istimewa. Setiap tamu istimewa wajib diperlakukan secara istimewa pula. Tamu istimewa selayaknya disambut dengan sukacita serta memulikannya. Bayangkan di tempat tinggal kita misalnya, akan kedatangan pejabat atau tokoh nasional, pasti kita akan menyambutnya dengan istimewa dan penuh rasa hormat. Dan menyiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin. Bagaimana dengan menyambut Ramadan? Kita mesti menyambutnya lebih dari ketika kita menyambut seorang tamu. Ramadan lebih dari seorang tamu sebab Ramadan merupakan anugerah dari Allah SWT yang nilainya sangat luar biasa. Dengan Ramadan, kita dapat meningkatkan kesalihan ritual kita kepada Allah SWT, yang sekaligus dapat kita dijadikan sebagai kesempatan untuk menyiapkan masa depan dunia dan akhirat. (*)-d

Prof Dr Sutrisna Wibawa MPd Kepala Lembaga Pengembangan UST. Guru Besar Pascasarjana UST dan UNY.

Lukas Enembe Dua Hari Mogok Minum Obat

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan kabar Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe mogok minum obat. Namun hal itu hanya berlangsung selama dua hari, yakni pada Senin dan Selasa kemarin (20-21/3).

"Dari informasi yang kami peroleh, betul tersangka LE mogok minum obat. Namun itu hanya pada Senin dan Selasa kemarin. Selanjutnya pada Rabu dan Kamis siang ini, yang bersangkutan sudah kembali minum obat seperti biasanya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (23/3).

Namun demikian, Ali tidak menenangkan soal alasan Lukas Enembe melakukan aksi mogok minum obat tersebut. Hanya saja disebut pemberian obat di-

lakukan dengan pengawasan petugas Rutan untuk memastikan obat tersebut diminumnya. "Obat yang diberikan merupakan resep dari dokter RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat)," ujarnya.

Kemudian berdasarkan laporan petugas Rutan KPK, sampai hari ini tidak ada keluhan soal kesehatan tersangka Lukas Enembe selama dalam tahanan. Untuk itu, KPK mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan narasi yang beredar dan belum terkonfirmasi kebenarannya. "KPK mengingatkan agar penasihat hukum kooperatif dalam melakukan pendampingan kepada tersangka, dan tidak bertindak di luar norma-norma hukum, agar perkara ini bisa segera mendapatkan kepastian hukum," jelas Fikri. **(Ful)-d**

Terjerat

semua lapisan masyarakat, namun sayangnya memang belum semua masyarakat bisa teredukasi dengan baik. OJK DIY bekerja sama dengan Komisi XI DPR RI sudah empat kali melakukan literasi di dua desa di Kabupaten Bantul dan dua desa di Kabupaten Sleman pada awal 2023 ini.

"Kami pun menggandeng anggota DPRD Sleman melakukan literasi keuangan di Tempel, Sleman dan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY di Umbulharjo, Yogya. Kami juga akan mengintensifkan patroli siber bekerja sama dengan Kominfo dan Kepolisian serta menayangkan iklan

Pejabat

negara (ASN) tidak menggelar acara buka puasa bersama selama bulan Ramadan 1444 Hijriah perlu dimaknai secara positif. "Yang jelas, larangan kubker (buka bersama) ini jangan disalahartikan, bukan melarang kegiatan keagamaan," katanya.

Pasalnya, kata Saleh, alasan yang disampaikan dalam surat arahan tersebut karena

Kanwil

Kemudian jemaah haji dengan urutan nomor pors terkecil sampai kuota terpenuhi berdasarkan data SISKOHAT dengan ketentuan berstatus cicil aktif, belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 10 tahun, dan telah berusia paling rendah 18 tahun pada 24 Mei 2023 atau sudah menikah. Jemaah haji lanjut usia diurutkan berdasarkan usia tertua dengan masa tunggu paling sedikit lima tahun di masing-masing provinsi sesuai kuota, dengan usia minimal 65 tahun sebelum 24 Mei 2023.

saat ini Indonesia masih dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi. "Secara global, status penanganan Covid-19 masih pandemi. WHO sampai saat ini belum berubah. Indonesia tentu harus ikut aturan WHO tersebut, termasuk mewaspadai berbagai kemungkinan menyebarnya virus berbahaya tersebut," ujarnya. **(Ant)-d**

Kemenag pun meminta jajarannya di Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag untuk menyosialisasikan daftar nama calon haji reguler yang berhak melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) pada 1444 H/2023 M.

"Daftar nama jemaah haji reguler yang berhak melunasi Bipih 2023 pada masing-masing provinsi sudah kami umumkan. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah menerbitkan edaran untuk seluruh Kanwil Kemenag Provinsi agar bisa menyosialisasikannya kepada para jemaah," ujar Saiful Mujah. **(Ati)-d**

AQUA KLATEN PERINGATI HARI AIR SEDUNIA Ajak Siswa Adiwiyata Belajar Kearifan Lokal dari Petani

KLATEN - PT Tirta Investama - Pabrik Klaten (AQUA Klaten) kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat memperingati Hari Air Sedunia, di Bendung Babor, Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Rabu (22/03/2023).

Stakeholder Relation Manager AQUA Klaten, Rama Zakaria mengemukakan, Peringatan Hari Air sedunia tahun ini istimewa, karena bertepatan dengan momentum keagamaan, Hari Raya Nyepi dan Menyambut Ramadan.

Rama menjelaskan, kegiatan diikuti juga oleh Pusur Institute, Forum Relawan Irigasi Jogo Toya Kamulyan, dengan tema Hari Air sedunia 2023 yaitu Pemerintah Desa Juwiring, Pemerintah Kecamatan Juwiring SMK N 1 Polanharjo, SMP N 2 Klaten, Gita Pertiwi Surakarta, SHIND (Secercah Harapan Indonesia) Jogja, LPTP (Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan) Surakarta dan Multi Stakeholder Forum (MSF) Klaten.

Selain mengingatkan pentingnya menjaga air, siswa diberi kesempatan



Peringatan hari Air Sedunia di Bendung Babor.

KR-Sri Warsiti

belajar dan memahami langsung kearifan lokal dari petani. Hal tersebut sesuai dengan tema Hari Air sedunia 2023 yaitu "Be The Change" atau menjadi motor perubahan dalam pengelolaan sumber daya air yang lebih baik.

Rama menambahkan, secara swadaya, jaringan irigasi sub DAS Pusur di wilayah hilir telah dikelola secara gotong royong oleh Gabungan Paguyuban Petani Pengguna Air (GP3A). Terlibat didalamnya, sebanyak 7 pemerintah desa

yang mendapatkan aliran dari Bendung Babor yang dibangun sejak tahun 1954. Dengan sistem kelola *Jaga Toya* ini, 596 ha lahan yang sebelumnya tidak terairi, saat ini telah terairi seluas 300 ha.

AQUA Klaten juga berperan mendorong 7 pemerintah desa untuk mewujudkan Peraturan Antar Desa (Perkades) dalam pengelolaan Jaringan irigasi secara kolaboratif. Ikatan hukum formal dalam Perkades tersebut supaya bisa saling mendukung model kearifan lokal dengan revitalisasi *Jaga Toya* dari Forum Relawan Irigasi. "Kita berharap upaya tersebut mampu menjadi alternatif solusi bagi permasalahan kelangkaan air persawahan di musim kemarau sekaligus mengendalikan laju air pada musim penghujan," ucap Rama.

Ketua Forum Relawan Irigasi *Jaga Toya* (Jaga Air) Kamulyan, Martono, menyampaikan pesan kearifan lokal dengan semangat Jawa *Memayu Hayuning Bawana*. "Air adalah sumber

kehidupan yang harus dikelola dan dimanfaatkan secara bijak. Merawatnya adalah tanggung jawab bersama, dilakukan secara bergotong-royong untuk masa depan anak-cucu. Nilai-nilai luhur Jawa ini harus dikenalkan dan dipahami oleh generasi muda," jelas Martono.

Danang, Kepala Desa Pundungan yang juga Ketua Pusur Institute menyampaikan, forumnya menjembatani antara pengguna air di hilir bisa memberikan manfaat balik kepada masyarakat di hulu. "Kami membangun Pusur Institute sebagai forum yang terdiri dari semua elemen diantaranya komunitas sungai, kelompok tani, akademisi, industri dalam hal ini AQUA Klaten dan masih banyak yang lain, untuk menggerakkan ekonomi dari hulu ke hilir, demikian juga sebaliknya. Sehingga semua pihak bisa turut mengambil peran dalam menjaga keseimbangan air di Sub DAS Pusur," kata Danang. (Sit)



Siswa mendengarkan paparan dari petani

KR-Sri Warsiti

RESPONS SIKAP KOMISI III DPR

MAKI Bakal Laporkan PPATK ke Bareskrim

JAKARTA (KR) - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bakal melaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke Bareskrim Polri. Laporan itu terkait dugaan tindak pidana kerahasiaan dokumen Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU).

"Ini adalah sebagai bentuk ikhtiar MAKI dalam membela PPATK bahwa apa yang dilakukan benar dan kalau ini dikatakan tidak benar oleh DPR, maka saya coba dengan logika terbalik mengikuti arusnya DPR dengan melaporkan PPATK kepada kepolisian," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Jakarta, Kamis (23/3).

Boyamin menyebut, langkah hukum ini dilakukan sebagai respons

atas pernyataan Komisi III DPR RI yang mengatakan ada pidana dari proses yang disampaikan oleh PPATK di Rapat Komisi III DPR RI Selasa (21/3) lalu. Aduan atau laporan polisi tersebut berkaitan dengan tindak apa yang dikatakan Anggota Komisi III tersebut bahwa apa yang dilakukan PPATK mengandung unsur pidana. "Nanti saya akan meminta kepolisian memanggil teman-teman di DPR yang mengatakan pidana dan

ini disertai dengan argumen yang DPR sampaikan kepada kepolisian," ujarnya.

Boyamin menilai, pernyataan DPR tersebut terkesan menyalahkan PPATK yang telah mengikuti arus di masyarakat dari proses yang telah terjadi terkait Rafael Alun yang memiliki kekayaan berlebih dari pejabat di negara ini. Dari kejadian itu, kemudian masyarakat menagih kinerja PPATK, yang ternyata telah melakukan penyelidikan transaksi keuangan sejak 2012 dan bahkan telah melakukan perhitungan sejak 2009 di mana ditemukan nilai transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. **(Ant/Has)-d**

MENGGUNAKAN KAPAL LAUT

Dibuka, Pendaftaran Mudik Gratis Motor

JAKARTA (KR) - Untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas angkutan jalan raya dan mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas pengguna jalan raya khususnya pengguna sepeda motor pada jalur Pantai Utara pada masa Angkutan Hari Raya Idul Fitri 2023, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali mengadakan program mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt Hendri Ginting mengatakan, mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut ini juga sebagai bentuk dukungan Ditjen Perhubungan Laut mengenalkan moda transportasi

alternatif untuk mudik di tahun 2023 ini. "Selain untuk menurunkan tingkat kepadatan di jalan raya dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan bagi pengemudi motor, mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut ini sebagai bentuk pengenalan kepada masyarakat bahwa kapal laut bisa sebagai moda alternatif untuk mudik Lebaran," ujar Hendri Ginting di Jakarta, Kamis (23/3).

Pada tahun 2023 ini diprediksi akan terjadi peningkatan jumlah pemudik. Berdasarkan survey Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub pada tahun 2023 jumlah pemudik berjumlah 123,8 juta orang, naik jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 85,5 juta

orang. Untuk itu dengan mudik gratis sepeda motor menggunakan kapal laut ini diharapkan dapat menekan kepadatan arus mudik.

Pendaftaran dan registrasi mudik motor gratis dilakukan secara online melalui <https://mudikgratis.dephub.go.id> dibuka Kamis, 23 Maret hingga 5 April 2023 dengan verifikasi pendaftaran pada 25 Maret-7 April 2023. Sedangkan pendaftaran offline 23 Maret-16 April 2023 di Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Gedung Cipta Lantai Dasar Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat No 8 Jakarta Pusat. **(Ati)-d**

Inefisiensi

pembangunan tiang yang terkesan tidak efisien tersebut? Terdapat beberapa indikasi penyebab. Pertama, tidak adanya kendali pendirian tiang dari pemegang kebijakan. Secara aturan, izin penggunaan ruang di tepi jalan ada pada pemerintah sesuai status jalan. Artinya, jalan nasional berada pada kewenangan pemerintah pusat, jalan provinsi diatur oleh pemerintah provinsi, dan jalan kabupaten/kota berada pada kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Pengalaman penulis, penambahan tiang pada jalan kabupaten hanya memerlukan izin dari pejabat di lingkup padukuhan dan RT. Hal ini di satu sisi memang memudahkan dalam penyediaan layanan. Namun di sisi lain menyebabkan tidak terkendalainya pembangunan tiang-tiang tersebut. Dapat dipahami, munculnya spanduk-spanduk penolakan pemasangan tiang di banyak tempat juga yang marak.

Kedua, terdapat banyak provider telekomunikasi yang menyebabkan tidak adanya koordinasi diantaranya provider telekomunikasi tersebut. Masing-masing

provider tentu memiliki rencana bisnis dan kebijakan yang berbeda-beda, sehingga tidak selamanya memiliki kesamaan wilayah pengembangan. Selain itu, persaingan antarprovider juga menjadi hambatan dalam melakukan koordinasi.

Ketiga, tidak adanya rencana jangka panjang penyediaan infrastruktur baik dari penyedia maupun dari pemegang kebijakan. Di wilayah yang relatif berkembang secara ekonomi, peran operator relatif lebih dominan dalam penyediaan infrastruktur karena besarnya potensi keuntungan yang dapat diperoleh. Dalam rencana bisnis, semestinya telah dapat diprediksi besaran *demand* dari wilayah layanan, sehingga dapat diprediksi kebutuhan tiang di masa mendatang. Dimensi pembangunan tiang diharapkan dapat mengikuti proyeksi demand tersebut.

Penggunaan tiang bersama pada provider telekomunikasi telah dipergunakan secara luas di berbagai negara. Penggunaan tiang maupun kanal kabel bersama telah dipergunakan secara luas sejak 2008 di Italia. Kajian Booz Allen Hamilton Inc tahun 2007 menunjukkan

faktor sukses penerapan tersebut ditentukan oleh upaya bersama antara operator dan regulator. Operator perlu mengalkulasi manfaat finansial dari berbagi infrastruktur yang dimiliki. Sementara regulator perlu mengembangkan kebijakan berbasis insentif untuk mengembangkan perjanjian berbagi pada level permainan yang setara.

Ada banyak kasus di mana operator dapat mengidentifikasi manfaat finansial sehingga mengadopsi perjanjian pembagian infrastruktur secara mandiri. Namun dalam kasus lain, intervensi peraturan diperlukan untuk mendorong penggunaan infrastruktur secara bersama. Peraturan tersebut mencakup empat dimensi : penetapan peraturan, penetapan harga, perlindungan terhadap penerapan peraturan dan penegakan kebijakan.

Referensi tersebut dapat menjadi acuan replikasi kisah sukses di berbagai negara mengenai penggunaan infrastruktur secara bersama. *(Penulis adalah peneliti pada Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustal), UGM dan peminat masalah infrastruktur)-d*